

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi
(Study Empiris Pada Kabupaten Waropen)**

Moses Aser Watopa
moseswatopa@gmail.com
Arius A. Kambu
Risky Novan Ngutra

Abstract

The purpose of this study was to analyze: (1) analyze the effect of the Regional Financial Accounting System Implementation on the Quality of Financial Statements of the local government of Waropen Regency; (2) Analyze the effect of the Internal Control System on the Quality of Financial Statements of the local government of Waropen Regency; (3) Analyze the effect of the implementation of the Regional Financial Accounting System on the Quality of Financial Statements of the local government of Waropen Regency with Human Resource Competence as a moderation variable; (4) Analyze the effect of the Internal Control System on the Quality of Financial Statements of the local government of Waropen Regency with Human Resource Competence as a moderation variable. The results showed that: (1) the significance value of the variable Application of the Regional Financial Accounting System was $0.048 > 0.05$ so that it could be concluded that the Regional Financial Accounting System did not affect the Quality of Local Government Financial Statements; (2) the significance value of the Internal Control System variable is $0.043 > 0.05$ so that it can be concluded that the Internal Control System does not affect the Quality of Local Government Financial Statements; (3) the significance value of the interaction variable between the Application of the Regional Financial Accounting System and the Competence of Human Resources of $0.299 > 0.05$ so that it can be concluded that the Competence of Human Resources is unable to moderate the effect of the Application of the Regional Financial Accounting System on the Quality of Local Government Financial Statements; (4) the significance value of the interaction variable between the Internal Control System and Human Resource Competence is $0.063 > 0.05$ so that it can be concluded that Human Resource Competence is unable to moderate the influence of the Internal Control System on the Quality of Local Government Financial Statements.

Keywords: *Regional Financial Accounting System, Control System Internal, Human Resource Competency, Quality of Financial Statements*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen; (2) Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Waropen; (3) Menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderasi; (4) Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Waropen dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai signifikansi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar $0,048 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (2) nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar $0,043 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (3) nilai signifikansi variabel interaksi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar $0,299 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (4) nilai signifikansi variabel interaksi antara Sistem Pengendalian Intern dengan Kompetensi Sumber Daya

Manusia sebesar $0,063 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*).

Penyusunan Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Secara umum, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah diketahui sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penyusunan laporan keuangan daerah yang berpedoman pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ini sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud juga mampu meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pada pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal mempunyai fungsi krusial di dalamnya yang mana sistem pengendalian internal ini sebagai pengendali dan pengawas terhadap proses penyusunan laporan keuangan

sehingga dapat dilaporkan dan disusun dengan benar, tepat waktu, tepat sasaran, dan juga sesuai terhadap standar sehingga memperoleh hasil opini audit yang baik. Sistem pengendalian internal juga diperlukan oleh pemerintahan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Dengan melihat proses ataupun tahapan menurut regulasi yang ada dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) serta penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), secara jelas dapat terlihat bahwa ini belum secara baik dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waropen, kondisi ini juga dapat dibuktikan dengan melihat hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Waropen.

Diakses pada lama papua.bpk.go.id, menunjukkan bahwa Kabupaten Waropen mendapatkan Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Salah satu kendala dihadapi pada tahun 2021, yaitu laporan keuangan Pemkab Waropen untuk tahun anggaran 2021 bahkan belum disampaikan kepada BPK provinsi Papua, walaupun batas waktu penyampaian LKPD hanya sampai dengan 31 Maret tahun 2022. Kondisi yang lebih memprihatinkan juga pernah terjadi dilingkungan pemerintahan Kabupaten Waropen, penyusunan APBD tahun anggaran di 2020 tidak dilakukan dengan melalui peraturan daerah (Perda), namun pemerintahan tetap dilaksanakan. Hasil dari capaian opini BPK Papua serta beberapa persoalan ini tentunya memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk kepala daerah serta jajarannya sehingga opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun yang akan datang.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen, (2) menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen, (3) menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen dengan Kompetensi Sumber Daya

Manusia sebagai variabel Moderasi, dan (4) menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel Moderasi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkup pemerintahan Kabupaten Waropen.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA) yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain Moderated Regression Analysis (MRA), Sobel test juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan melalui suatu variabel mediasi secara signifikan, yang mana variabel tersebut diuji apakah mampu berperan ataupun sebaliknya sebagai mediator dalam hubungan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian Uji Regresi dengan Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar $0.048 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kemudian hasil pengujian Uji Regresi dengan Moderated Regression Analysis (MRA) juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar

0.043 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian Uji Regresi dengan Moderated Regression Anlysis (MRA) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,299 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

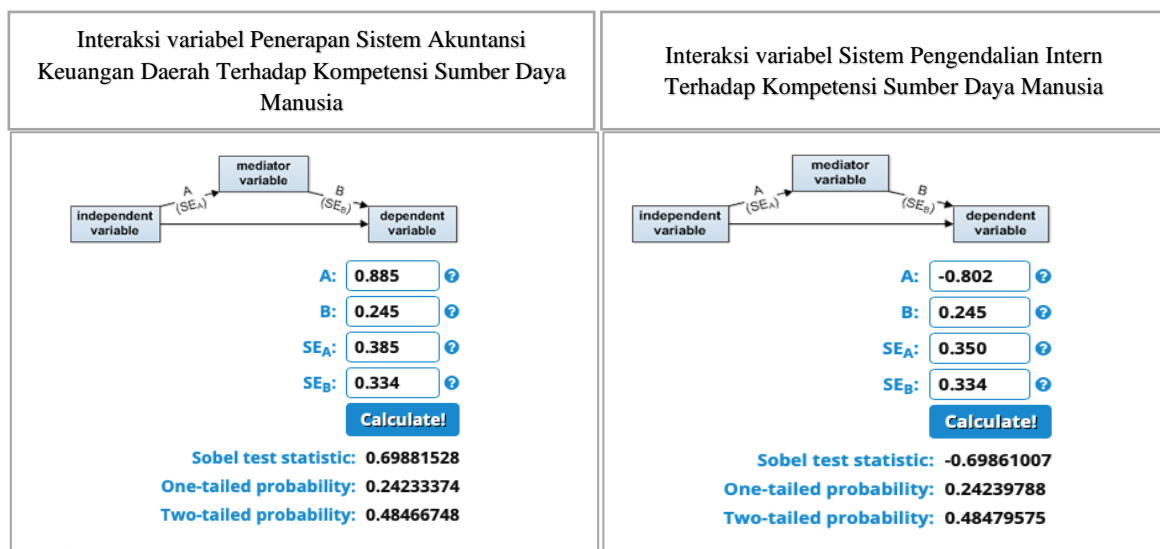
Kemudian hasil pengujian lainnya juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara Sistem Pengendalian Intern dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,063 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.872	12.891		1.154	.250
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.769	.385	.885	1.997	.048
	Sistem Pengendalian Intern	-.713	.350	-.802	-2.039	.043
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.273	.334	.245	.817	.415
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah * Kompetensi Sumber Daya Manusia	-.010	.010	-.616	-1.042	.299
	Sistem Pengendalian Intern * Kompetensi Sumber Daya Manusia	.017	.009	1.053	1.871	.063

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: Data diolah Peneliti, 2023.

Kemudian berdasarkan hasil Sobel Test yang dilakukan dengan menggunakan bantuan online kalkulator menunjukkan bahwa: (1) Interaksi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai sebesar 0.69 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya

Manusia tidak signifikan memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Interaksi variabel Sistem Pengendalian Intern terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai sebesar $-0.69 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak signifikan memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Gambar 1. Hasil Sobel Test

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Merujuk pada hasil pengujian Uji Regresi dengan Moderated Regression Anlyisis (MRA) yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini dapat ditunjukkan dengan melihat tingkat signifikansi sebesar $0.048 > 0.05$. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Launtu, 2021) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Hasil pengujian statistik di atas sangat relevan jika dihubungkan dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Waropen. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2010-2020 BPK secara berturut-turut memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Waropen. Kondisi ini dapat memberikan indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Waropen belum menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah secara berkualitas dengan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen, maka diperlukan komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait, termasuk penerapan SAKD yang tepat dan dilaksanakan dengan benar. Selain itu, profesionalisme dan integritas dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses akuntansi juga merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian Uji Regresi dengan Moderated Regression Anlysis (MRA) juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. hasil ini dapat diperkuat dengan melihat nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern yang lebih besar dari 0.05. hasil ini juga dapat diperkuat dengan melihat nilai Thitung -2.039 yang lebih kecil dari nilai Ttabel 1.654, dan memiliki nilai koefisien β negatif yaitu -0.802.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati et al., 2019) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif. Pada sudut pandang yang lain, hasil pengujian statistik di atas sangat relevan dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Waropen. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2010-2020 BPK secara berturut-

turut memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Waropen. Kondisi ini dapat memberikan indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Waropen belum menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah secara berkualitas, sehingga dapat diartikan juga bahwa Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintahan Kabupaten Waropen belum diterapkan secara optimal.

Penerapan SPI harus didukung oleh komitmen yang kuat dari manajemen pemerintah daerah Kabupaten Waropen dan adanya budaya integritas dan akuntabilitas dalam organisasi. Selain itu, pemantauan dan evaluasi rutin atas efektivitas SPI juga penting untuk memastikan SPI berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi

Merujuk pada hasil pengujian Uji Regresi dengan Moderated Regression Anlyisis (MRA) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi variabel interaksi antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang lebih besar dari 0.05. hasil ini dapat diperkuat juga dengan melihat nilai T_{hitung} -1.042 yang lebih kecil dari nilai T_{tabel} 1.654, dan interaksi kedua variabel ini juga memiliki nilai koefisien β negatif yaitu -0.616.

Hasil pengujian statistik ini tidak sejalan dengan hasil dari tanggapan responden yang secara rata-rata menunjukkan sebesar 57,75% berpendapat "Setuju" dengan setiap item pertanyaan yang termuat dalam variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kemudian Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indrayani & Widiastuti, 2020) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian statistik di atas sangat relevan dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Waropen. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2010-2020 BPK secara berturut-turut memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Waropen. Kondisi ini dapat memberikan indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Waropen belum menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah secara berkualitas, sehingga dapat diartikan juga bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Waropen belum optimal dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Waropen sehingga berdampak kepada kualitas laporan keuangan pemerintah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Waropen.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil pengujian Uji Regresi dengan Moderated Regression Anlyisis (MRA) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. hasil ini dapat diperkuat dengan melihat bahwa nilai signifikansi interaksi antara Sistem Pengendalian Intern dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang lebih besar dari 0.05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indrayani &

Widiastuti, 2020) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif penerapan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian statistik di atas sangat relevan jika dihubungkan dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Waropen. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2010-2020 BPK secara berturut-turut memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Waropen. Kondisi ini dapat memberikan indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Waropen belum menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah secara berkualitas, sehingga dapat diartikan juga bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Waropen belum optimal dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Waropen sehingga berdampak kepada kualitas laporan keuangan pemerintah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) akan membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan efektif serta mengurangi risiko potensial yang dapat timbul akibat kegagalan sistem pengendalian.

SIMPULAN

Merujuk pada berbagai hasil pengujian statistik yang telah dilakukan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. (1) Nilai signifikansi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar $0.048 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian

Intern adalah sebesar $0.043 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (3) Nilai signifikansi variabel interaksi antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar $0,299 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (4) Nilai signifikansi variabel interaksi antara Sistem Pengendalian Intern dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar $0,063 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O. R. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Alamsyah, M. R., Rahayu, S., & Muslih, M. (2017). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Emperis pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota D. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2), 201–210.
- Andelina, M. W., & Hariyanto, A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(November), 132–153. <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/149>
- Andini, D., & Yusrawati. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26(Juni), 33–41. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1855–1869.
- Askikarno, C. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(Desember), 121. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260>
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen

- Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(Januari), 977–989. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686>
- Binawati, E. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas SKPD Di Kabupaten Klat. *OPTIMAL*, 21(Maret), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Chairina, F., & Wehartaty, T. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 11(Januari), 31–39. <https://doi.org/10.33508/jako.v11i1.2073>
- Darmawati, Ruslan, M., & Marjuni, S. (2019). Peran Informasi Akuntansi Dalam Sektor Pemerintahan: Presfektif Agency Theory. *Economics Bosowa Journal*, 5(001), 515.
- Drama, H. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada SKPD Kota Solok). <https://ejournal.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Edinov, S., Taufik, T., Basri, Y. M., Indrawati, N., & DP, E. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance dengan Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(Oktober), 3815–3824. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192>
- Erni, Gunawan, & Hasmin. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. *YUME : Journal of Management*, 1(2), 131–148.
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Da. *Pekbis Jurnal*, 12(Maret), 39–54.
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Land Journal*, 1(Januari), 1–15. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.557>
- Ghozali, H. I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (P. P. Harto (ed.); VII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusherinsya, R., & Samukri. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(April), 58–68.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Lima Puluh Kota). 144–150.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020a). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>

- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020b). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 21(Desember), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 18(April), 14–27. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1318>
- Makoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 4(2), 874–890. <https://doi.org/10.32663/jaz.v4i2.2443>
- Mulyana, Z. T., Christina, V., & Brahmana, S. S. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manjerial dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Universitas Widyatama). *Jurnal Universitas Widyatama, Juli*, 1–1052.
- Mulyati, N. S., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal AKUNTAPEDIA*, 1(Desember), 60–71. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Patra, A. D. A., Bustami, L., & Hasriani. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 02(Februari), 1–9.
- Putri, A. M., Kirmizi, K., & Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ekonomi*, 24(Desember), 16–31.
- Rafid, R. Z. (2016). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Bone)* [Universitas Islam Negeri Alauddin]. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec
- Rahmasari, R. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Saipullah, L. (2017). *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Lingkungan Eksternal Sebagai Variabel Moderating (Studi*

- Empiris Pada SKPD di Kabupat.* Universitas UIN Alauddin Makassar.
- Taviana, T., & Riharjo, I. B. (2020). Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(Januari), 1–23. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2763>
- Triono, S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2(1), 213–220. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Wahyuni, R. (2021). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumberdaya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wulandari, M. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok . In *Journal of Materials Processing Technology* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–8). <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org>
- Yenni, E., Irman, M., & Fadrul, F. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pekanbaru). *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 1(1), 64–88. <https://doi.org/10.37385/raj.v1i1.34>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.